

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Qatar dan Arab Saudi memiliki hubungan yang cukup baik pada awalnya. Namun, pada tahun 1995, di bawah kepemimpinan Syekh Hamad bin Khalifa Al Thani, hubungan Qatar dengan negara-negara Teluk mulai mengalami kesenjangan. Misalnya adalah Qatar, yang menjadi negara dengan kepemimpinan monarki revolusioner sementara orang-orang Arab masih bertahan dalam kepemimpinan monarki tradisional. Hubungan yang bergejolak antara Qatar dan negara-negara Teluk mulai muncul di panggung internasional pada tahun 2011 dengan fenomena *Arab Spring*.

Gejolak *Arab Spring* pada 2011 menjadi awal untuk mengakhiri rezim otoritarianisme dan bangkitnya ekspektasi publik untuk kehidupan yang demokratis di kawasan Timur Tengah yang tidak terlepas dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi.¹ Secara khusus *Arab Spring* memengaruhi hubungan bilateral dan kebijakan luar negeri Qatar dan Arab Saudi dan memengaruhi hubungan mereka ke arah negatif. Selama waktu itu, persaingan dan konflik keduanya diperburuk ketika mereka menggunakan peristiwa *Arab Spring* untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh negara di kawasan Timur Tengah. Qatar mengejar kepentingannya dan mengadopsi kebijakan luar negeri yang independen sedangkan Arab Saudi berusaha memaksakan kebijakannya di Qatar.²

¹ Ahmad Sahide et al., "The Arab Spring: Membaca Kronologi Dan Faktornya Penyebabnya," *Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 2 (2015): 118–29, <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0072.118-129>.

² Abdul Rezak Bilgin, "Relations between Qatar and Saudi Arabia after the Arab Spring," *Contemporary Arab Affairs* 11, no. 3 (2018): 113–33, <https://doi.org/10.1525/caa.2018.113006>.

Qatar merupakan negara pendukung *Arab Spring* sekaligus anggota organisasi GCC (Gulf Cooperation Council). Hal ini bisa terlihat ketika sikap Qatar yang memberikan dukungan dalam peristiwa demokratisasi Mesir kepada demonstran Ikhwanul Muslimin dalam memenangkan pemilihan di negara-negara yang mendukung *Arab Spring*.³ Sikap Qatar ini bertolak belakang dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) yang menganggap Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris yang harus dilarang dari percaturan politik Timur Tengah karena dapat menimbulkan ketegangan di kawasan.⁴ Perbedaan-perbedaan prinsip dan dukungan tersebut yang akhirnya menjadi penyebab Qatar dan sejumlah negara di Timur Tengah mengalami beberapa kali krisis diplomatik.

Krisis diplomatik pertama dimulai ketika koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi yaitu negara Mesir, Bahrain, dan UEA mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.⁵ Konflik pemutusan hubungan diplomatik terjadi pada tahun 2014 yakni saat Arab Saudi, Bahrain, dan UEA menarik ketiga duta besarnya dari Doha, Qatar pada bulan Maret sebagai protes atas tuduhan campur tangan urusan dalam negeri mereka.⁶ Kemudian pada November 2014 ketegangan tersebut berhasil diatasi dan hubungannya kembali normal.⁷

³ Kristian Coates Ulrichsen, "Qatar and the Arab Spring: Policy Drivers and Regional Implications," *Carnegie Endowment for International Peace*, no. September (2014): 6, http://carnegieendowment.org/2014/09/24/qatar-and-arab-spring-policy-drivers-and-regional-implications%5Cnhttp://carnegieendowment.org/files/qatar_arab_spring.pdf.

⁴ Ibrahim Fraihat, "Superpower and Small-State Mediation in the Qatar Gulf Crisis," *International Spectator* 55, no. 2 (2020): 79–91, <https://doi.org/10.1080/03932729.2020.1741268>.

⁵ Mudra Rakshasa-loots, "Righteous or Rebellious? Narratives of the Qatar Diplomatic Crisis in British and Qatari Media," n.d., <https://osf.io/preprints/socarxiv/2durj/>.

⁶ Gabriel Collins et al., "The GCC Crisis at One Year," *Measures of Stalemate in the GCC Crisis*, no. Measures of Stalemate in The GCC Crisis (2018): 15, <http://arabcenterdc.org/wp-content/uploads/2018/07/Stalemate-becomes-reality.pdf>.

⁷ Broto Wardoyo, "Rivalitas Saudi-Qatar Dan Skenario Krisis Teluk," *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.18196/hi.71127>.

Namun hubungan baik Qatar dengan sejumlah negara GCC tidak bertahan lama. Pada 23 Mei 2017 ketegangan didasari oleh pernyataan Qatar mengenai pemberitaan resmi dari *Qatar News Agency* yang diduga diretas oleh pihak yang tidak diketahui dengan membuat *running text*.⁸ Sehingga ini mengesankan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani memuji pihak Hamas; menganjurkan persahabatan dengan Iran, dan merekomendasikan hubungan baik dengan Israel yang mempengaruhi aktivitas keamanan kawasan Timur Tengah.⁹ Meski berita itu diklarifikasi oleh pihak Qatar sebagai berita yang tidak benar (*fake news*) akan tetapi Arab Saudi dan sekutunya tetap bersikukuh bahwa Qatar keluar dari aliansi.

Kemudian pada 24-25 Mei 2017, pihak berwenang di Arab Saudi, Bahrain, UEA, dan Mesir memblokir situs *website* Al Jazeera.¹⁰ Ketiga negara tersebut mengklaim bahwa Qatar belum mengimplementasikan perjanjian keamanan GCC 2013 yang ditandatangani antara negara-negara Teluk.¹¹ Ketegangan ini berlanjut pada tanggal 5 Juni 2017, ketika Arab Saudi bersama Mesir, Bahrain, UEA, Yaman, Libya, dan Maladewa memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.¹² Konstelasi semakin menguat ketika Qatar melalui Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menyatakan bahwa Arab Saudi yang paling bertanggung jawab atas blokade kepada Qatar. Mohammed bin Abdulrahman al-

⁸ Marc Owen Jones, "Hacking, Bots and Information Wars in the Qatar Spat," *Hacking, Bots and Information Wars in the Qatar Spat* 2, no. November (2018): 7–9, https://www.researchgate.net/publication/328731769_Hacking_bots_and_information_wars_in_the_Qatar_spat.

⁹ Rizza Setia Octaviarie, "Alasan Kebijakan Arab Saudi Melakukan Blokade Terhadap Qatar," *Tesis*, 2019, 1–18, https://repository.unair.ac.id/87520/5/RIZZA_SETIA_OCTAVIARIE-071511233013-JURNAL.pdf.

¹⁰ Jessica Pulsone, "Rivalries in the Gulf: Geopolitical Implications of the Qatar Crisis By Jessica Pulsone Contents List of Tables and Figures," n.d., 1–97, <https://www.futuroquotidiano.com/wp-content/uploads/2020/02/Thesis-Rivalries-in-the-Gulf-1.pdf>.

¹¹ Bilgin, "Relations between Qatar and Saudi Arabia after the Arab Spring."

¹² Wardoyo, "Rivalitas Saudi-Qatar Dan Skenario Krisis Teluk."

Thani menyebutkan bahwa Arab Saudi melakukan konspirasi dan memimpin blokade terhadap Qatar.¹³

Untuk mencapai tahap rekonsiliasi, negara-negara di kawasan Timur Tengah maupun negara lain di luar kawasan sudah melakukan upaya resolusi konflik yang cukup panjang sebelumnya. Upaya pertama kali yang dilakukan untuk meredam ketegangan adalah diinisiasinya mediasi oleh Kuwait. Pihak kuartet Arab seperti Arab Saudi, Bahrain, UEA, dan Mesir mengajukan daftar tuntutan pada Qatar dari Kuwait yang berisi 13 poin sebagai imbalan untuk mengakhiri blokade.¹⁴ Namun Qatar mengaku semua tuntutan tersebut tak akan mampu mereka penuhi, sebab beberapa poin dalam tuntutan negara-negara Teluk dianggap tidak sesuai dengan realitas, tak masuk akal, dan beralasan.¹⁵ Setelah Qatar menolak tuntutan-tuntutan tersebut Kuwait menggunakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kepala Negara GCC, pada Desember 2017, sebagai tempat dialog antar pemimpin dan secara pribadi mengundang Raja Salman dari Arab Saudi untuk hadir dan berkontribusi pada upaya resolusi selanjutnya.¹⁶

Pada beberapa kesempatan pemulihan hubungan juga gagal membantu menjembatani perpecahan. Hal ini tergambar ketika Emir Kuwait Syekh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Ahmad pada Oktober 2019 menyerukan agar konflik dengan

¹³ Paul D. Shinkman, "Qatari Diplomat: Blockade the Result of Arab Effort to Discredit Doha, Manipulate Trump | World Report | US News," accessed February 6, 2022, <https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-06-29/qatari-diplomat-blockade-the-result-of-arab-effort-to-discredit-doha-manipulate-trump>.

¹⁴ Jane Kinninmont, "The Gulf Divided: The Impact of the Qatar Crisis," *Middle East and North Africa Programme: Research Paper*, no. May (2019): 1–42, https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2019-05-30-Gulf-Crisis_0.pdf.

¹⁵ Cinzia Bianco and Gareth Stansfield, "The Intra-GCC Crises: Mapping GCC Fragmentation after 2011," *International Affairs* 94, no. 3 (2018): 613–35, <https://doi.org/10.1093/ia/iyy025>.

¹⁶ Ahmed Al-Masry, "Emir Kuwait Menuju Ke Riyadh Untuk Melanjutkan Upaya Menyelesaikan Krisis Teluk," accessed December 3, 2021, <https://www.aa.com.tr/ar/-الى-الكويت-بتوجه-الى-الرياض-لاستئناف-جهود-حل-الازمة-الخليجية/938764>.

Qatar segera diakhiri.¹⁷ Lalu Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz al-Saud mengundang Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad al-Thani untuk menghadiri KTT GGC ke-40 di Riyadh. Namun pada tanggal 10 Desember 2019 Syekh Tamim tidak hadir di konferensi dan hanya mengirim delegasi tingkat menteri luar negerinya. Ketidakhadiran Syekh Tamim menghambat proses dialog untuk mengakhiri perselisihan namun kemungkinan negosiasi akan terus berlanjut.¹⁸

Hingga pada akhirnya disepakati rekonsiliasi antara Qatar dan kuartet Arab (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir) yang diumumkan secara resmi pada 5 Januari 2021 dalam forum KTT GCC ke-41 yang digelar di Provinsi Al-Ula, Arab Saudi merupakan peristiwa penting di dunia Arab maupun internasional.¹⁹ Para pemimpin enam negara anggota GCC (Arab Saudi, UEA, Oman, Kuwait, Bahrain, dan Qatar) menandatangani perjanjian “*solidarity and stability*”, yang disebut dengan Al-Ula Declaration.²⁰ Pengumuman perjanjian tersebut disertai dengan pernyataan dari negara-negara kuartet Arab bahwa mereka akan segera memulihkan hubungan diplomatik penuh dengan Qatar.²¹ Usaha memperbaiki konflik Qatar-Arab Saudi melalui rekonsiliasi tersebut menarik untuk diteliti karena

¹⁷ “Qatari Media: Saudi King Salman Invites Qatar’s Emir to Attend GCC Summit | Al Arabiya English,” accessed June 2, 2022, <https://english.alarabiya.net/News/gulf/2019/12/03/Qatari-media-Saudi-King-Salman-invites-Qatar-s-Emir-to-attend-GCC-summit>.

¹⁸ Majed Mohammed Hassan Al-Ansari, Bülent Aras, and Emirhan Yorulmazlar, “The New Gulf Order: Crisis, Mediation, and Reconciliation,” *Middle East Policy* 28, no. 1 (2021): 23–35, <https://doi.org/10.1111/mepo.12544>.

¹⁹ Farah Najjar, “What’s behind the Latest GCC Reconciliation Efforts? | GCC News | Al Jazeera,” accessed December 1, 2021, <https://www.aljazeera.com/news/2020/12/30/whats-behind-the-latest-gcc-reconciliation-efforts>.

²⁰ Vincent Charles Keating and Lucy M. Abbott, “Entrusted Norms: Security, Trust, and Betrayal in the Gulf Cooperation Council Crisis,” *European Journal of International Relations*, 2021, <https://doi.org/10.1177/13540661211044197>.

²¹ Keating and Abbott. Entrusted Norms: Security, Trust, and Betrayal in the Gulf Cooperation Council Crisis. 24

setelah melalui upaya perbaikan hubungan beberapa kali akhirnya berhasil dan meredam konflik.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik maupun krisis diplomatik yang terjadi berulang kali antara Qatar dan Arab Saudi merupakan ancaman terhadap kestabilan kawasan Timur Tengah. Krisis diplomatik disertai pemblokadean pada Qatar oleh Arab Saudi pada 5 Juni 2017 merupakan peristiwa yang disebabkan oleh kumpulan dari masalah-masalah yang menumpuk. Untuk meminimalisir dampak keberlanjutan yang tidak diinginkan dan potensi konflik di masa yang akan datang, para masing-masing pihak yang terlibat maupun tidak memiliki kesadaran agar memperbaiki krisis diplomatik tersebut. Hingga pada 5 Januari 2021 melalui Konferensi Tingkat Tinggi Gulf Cooperation Council (GCC) ke-41 Qatar dan Arab Saudi meredakan konflik selama empat tahun dengan rekonsiliasi. Hal tersebut tentu melalui proses panjang yang tidak mudah. Untuk mengetahui penyelesaian konflik antara Qatar dan Arab Saudi, penulis ingin melihat faktor apa yang menyebabkan rekonsiliasi berhasil untuk memulihkan kembali hubungan persahabatan antar kedua negara dan bertujuan mewujudkan perdamaian dalam jangka waktu yang lama.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka pertanyaan pada penelitian ini yaitu “Apa faktor-faktor penyebab keberhasilan rekonsiliasi antara Qatar dan Arab Saudi?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa saja faktor-faktor penyebab keberhasilan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik Qatar-Arab Saudi.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai referensi literatur dalam konteks resolusi konflik dan rekonsiliasi Qatar-Arab Saudi.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca dalam memahami penggunaan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik.

1.6 Studi Pustaka

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, peneliti berusaha menghimpun sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan menemukan beberapa referensi yang relevan untuk dijadikan acuan dalam mengkaji topik yang diangkat. Adapun beberapa referensi yang peneliti jadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, peneliti merujuk pada artikel jurnal dari Febriandi yang berjudul *Kegagalan Diplomasi Koersif Arab Saudi terhadap Qatar*.²² Pada tulisan ini, Febriandi lebih fokus dalam menjelaskan faktor-faktor kegagalan diplomasi koersif yang dilakukan oleh Arab Saudi dan sekutu terhadap Qatar. Arab Saudi yang telah

²² Febriandi, "Kegagalan Diplomasi Koersif Arab Saudi Terhadap Qatar," *Indonesian Journal of International Relations* 2, no. 1 (2018): 1–14, <https://doi.org/10.32787/ijir.v2i1.40>.

memberikan 13 tuntutan kepada Qatar agar terbebas dari blokade sudah ditolak oleh Qatar, dalam temuan tulisan tersebut ini disebabkan oleh peran Qatar sebagai salah satu *rising state* di kawasan sehingga membuat diplomasi koersif Arab Saudi menjadi sia-sia. Salah satu faktor lainnya adalah peningkatan kemampuan militer dan ekonomi Qatar menjadi salah satu faktor kegagalan tersebut.

Dengan demikian, tulisan ini menjadi referensi penulis dalam melihat faktor-faktor kegagalan dalam penyelesaian masalah Qatar dan Arab Saudi. Penulis bisa melihat upaya diplomasi koersif tersebut sebagai instrumen dan strategi dalam resolusi konflik. Namun, kelemahan dari artikel jurnal yang ditulis Febriandi adalah hanya melihat dari segi mengapa Qatar menolak 13 tuntutan Arab Saudi saja, sedangkan penulis akan melihat bagaimana kendala penyelesaian masalah Qatar dan Arab Saudi dari kedua belah pihak yang terlibat.

Referensi selanjutnya adalah tulisan Ignasi Turent Olivia berjudul *An Analytical Framework for Reconciliation Processes, Two Case Studies in The Context of Post-War Bosnia and Herzegovina*.²³ Pada tulisannya, Olivia menganalisis pasca kekerasan yang terjadi di Bosnia dan Herzegovina menggunakan kerangka rekonsiliasi dengan fokus rekonsiliasi sebagai upaya terakhir dalam memperbaiki konflik. Olivia menganalisis dua studi kasusnya, kasus pertama yaitu proyek yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat Amerika (DiaCom) pada tahun 2000-2003, sebagai ‘penyembuhan luka’ atau *healing* bagi Sanski Mkost dan Prijedor di Bosnia Utara. Kasus kedua menggambarkan tugas dari Association of Citizens Truth and Reconciliation of

²³ IT Oliva, “An Analytical Framework for Reconciliation Processes. Two Case Studies in the Context of Post-War Bosnia and Herzegovina.,” *CulturalDiplomacy.Org*, 2011, <http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2012-04-ankara/An-analytical-framework-for-reconciliation-processes--Ignasi-Torrent-Oliva.pdf>.

Bosnia and Herzegovina (ATR), yang tujuan utamanya adalah untuk membentuk di Bosnia Truth and Reconciliation Commission (TRC). Kedua kasus tersebut dijelaskan dengan kerangka proses rekonsiliasi, konsep rekonsiliasi dan keadilan oleh Kriesberg, dan sudut pandang rekonsiliasi dari sosial-psikologis oleh Kelman.

Hasil temuan tulisan tersebut adalah membuktikan bahwa kerja praktek yang dilaksanakan di lapangan dengan meneliti proses rekonsiliasi berhasil memiliki dampak nyata pada hubungan antar masyarakat. Menggunakan lima fase rekonsiliasi (*truth telling, apology, forgiveness, reparation and initiative for interaction*) di setiap lembaga bisa terjalin keselarasan. Dalam studi kasus ini juga, Karuna Center for Peacebuilding berhasil menjadi *Non-Governmental Organization* (NGO) yang berfokus pada proses *peacebuilding*. Tulisan ini berguna bagi penulis untuk mendapat gambaran mengenai cara menganalisis studi kasus ke dalam kerangka kerja konsep rekonsiliasi. Perbedaan penelitian peneliti dengan tulisan milik selain pada studi kasusnya adalah penggunaan konsep rekonsiliasi. Penulis menggunakan konsep rekonsiliasi dari Nadim N. Rouhana.

Referensi selanjutnya adalah tulisan Majed Mohammed Hassan Al-Ansari, yang berjudul *The Unbridgeable Gulf: Applying Bennett's Model of Analysis to the 2017 Gulf Crisis*.²⁴ Pada tulisan ini Al-Ansari berfokus untuk menganalisis tentang sifat, penyebab, dan masa depan konflik melalui lensa blokade Qatar selama hampir empat tahun (2017-2020) dengan menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh William Bennett untuk menilai konflik antar negara di kawasan Teluk. Menggunakan model Bennet, jurnal ini menjelaskan bagaimana blokade Qatar

²⁴ Majed Mohammed Hassan Al-Ansari, "The Unbridgeable Gulf: Applying Bennett's Model of Analysis to the 2017 Gulf Crisis," *Journal of Balkan and Near Eastern Studies* 23, no. 3 (2021): 502–15, <https://doi.org/10.1080/19448953.2021.1888252>.

adalah produk dari ambisi hegemoni Arab Saudi. Model Bennett berpendapat bahwa konflik politik hasil dari ketidakseimbangan dan permintaan sumber daya yang terus menerus, hal ini membuktikan bahwa konflik politik tidak dapat dipecahkan, hegemoni regional diidentifikasi sebagai sumber daya politik yang melanggengkan konflik antara Qatar dan Arab Saudi.

Tulisan ini bermanfaat sebagai referensi penulis untuk melihat faktor apa saja penyebab dan perkembangan konflik antara Qatar dan Arab Saudi. Namun, artikel jurnal ini memiliki batasan pembahasan yang lebih merujuk kepada usaha Arab Saudi untuk mencapai hegemoni regional dan mengendalikan sumber daya dan kedalaman strategis di kawasan Teluk dan penyelesaian resolusi konflik yang sudah diupayakan hanya bersifat parsial, sedangkan penulis akan melihat upaya resolusi konflik dan perbaikan hubungan diplomatik kedua belah pihak.

Selanjutnya, artikel jurnal yang ditulis oleh Majed Mohammed Hassan Al-Ansari, Bülent Aras, dan Emirhan Yorulmazlar, yang berjudul *The New Gulf Order: Crisis, Mediation, and Reconciliation*.²⁵ Dalam tulisan ini dijelaskan latar belakang krisis Teluk tahun 2017 dalam konteks yang luas dari *Arab Spring* dengan mengkategorikan ke dalam tiga kubu berbeda dalam hal ini, yaitu 1). Turki dan Qatar yang pro revolusioner, 2). Kontrarevolusioner Arab Saudi, UEA, dan Bahrain, dan 3). Iran yang pragmatis terhadap geopolitik Syiah dan menganalisis upaya mediasi berikutnya, peran Amerika Serikat di kawasan, perkembangan politik di Kuwait dan Oman, upaya normalisasi dengan Israel, dan resolusi krisis Teluk dengan memeriksa peran politik berbagai aktor. Al-Ansari dkk mengungkapkan kelemahan dari setiap mekanisme resolusi konflik di dalam piagam GCC

²⁵ Al-Ansari, Aras, and Yorulmazlar, "The New Gulf Order: Crisis, Mediation, and Reconciliation."

disebabkan oleh terkikisnya visi strategis bersama dan mengakarnya celah yang lebih berbahaya. Di dalam tulisan ini juga menjelaskan bahwa rekonsiliasi yang sudah berhasil dilaksanakan ternyata hanya sebagai solusi parsial karena banyaknya kepentingan negara-negara yang terlibat dalam konflik ini. Tulisan ini digunakan sebagai penulis untuk melihat peran dan pengaruh aktor lain didalam upaya resolusi konflik Qatar dan Arab Saudi. Ini penting karena krisis Qatar tidak hanya menjadi sorotan di dalam regional melainkan juga dunia internasional yang ikut campur dalam perpolitikan Timur Tengah.

Referensi selanjutnya adalah artikel jurnal tulisan Abdul Rezak Bilgin berjudul *Relations Between Qatar and Saudi Arabia After the Arab Spring*.²⁶ Pada tulisan ini Bilgin menjelaskan hubungan Qatar dan Arab Saudi yang beberapa kali mengalami ketegangan setelah gejolak *Arab Spring*. Sebab dari ketegangan dan masalah antar keduanya adalah walaupun Qatar dan Arab Saudi memiliki latar belakang sejarah yang hampir sama tetapi memiliki minat dan kebijakan yang berbeda. Mereka juga mempresepsikan ancaman terhadap kepentingan mereka secara berbeda. Bilgin juga menjelaskan tentang bagaimana perebutan kekuasaan regional dan persaingan antara Riyadh dan Doha selama *Arab Spring* ketika ketidaksepakatan dan bentrok meningkat.

Dengan demikian tulisan ini berguna bagi penulis untuk melihat sebab dan perkembangan hubungan Qatar dan Arab Saudi yang sering mengalami ketegangan baik sebelum dan sesudah *Arab Spring*. Perbedaan antara tulisan Bilgin dan penulis adalah tulisan Bilgin memakai konsep realisme klasik dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan sehingga lebih fokus pada kepentingan kedua belah pihak,

²⁶ Bilgin, "Relations between Qatar and Saudi Arabia after the Arab Spring."

sedangkan penulis akan berfokus pada faktor penyebab keberhasilan atas konflik sudah ditangani dengan rekonsiliasi.

1.7 Kerangka Konsep

Penggunaan teori atau konsep dalam sebuah penelitian sangatlah dibutuhkan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada serta membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dipaparkan. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, peneliti akan menggunakan konsep rekonsiliasi sebagai kerangka konseptual. Konsep ini sangat penting dalam menjawab pertanyaan penelitian yang muncul karena adanya anomali pada isu ini.

1.7.1 Rekonsiliasi

Dalam interaksi perpolitikan antar negara dan hubungan internasional konflik tidak bisa dihindari. Konflik dapat terjadi sangat kompleks karena benturan kepentingan, kebutuhan, serta posisi dalam kelompok-kelompok sosial maupun organisasi antar-kelas yang baik terdapat dalam sebuah negara atau antar negara.²⁷ Kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara (*national interest*) didasarkan pada pemenuhan kebutuhan nasional serta kekuatan sumber daya yang dimiliki sebagai bahan untuk bersaing di dunia internasional.²⁸ Secara tradisional, istilah "konflik internasional" mengacu pada konflik antara negara-bangsa yang berbeda dan konflik antara orang-orang dan organisasi di negara-bangsa yang berbeda.²⁹ Tidak jarang konflik juga diintervensi oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi perkembangan konflik dan memungkinkan konflik menjadi semakin meluas.

²⁷ *Managing Conflict of Interest in the Public Sector, Managing Conflict of Interest in the Public Sector*, 2006, <https://doi.org/10.1787/9789264065123-1v>.

²⁸ Joseph S. Nye, "Redefining National the Interest," *Foreign Affairs* 78, no. 4 (1999): 22–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/20049361>.

²⁹ Cate Malek, "International Conflict | Beyond Intractability," March 2013, <https://www.beyondintractability.org/coreknowledge/international-conflict>.

Konsep konflik dalam perkembangannya, konflik bersifat dinamis karena mengalami peningkatan (eskalasi) dan penurunan (de-eskalasi).³⁰ Menurut Morton Deutsch, konflik pada dasarnya memiliki sifat merusak (*destructive*) dan membangun (*constructive*).³¹ Konflik yang tidak berujung atau tidak mencapai kesepakatan damai kemudian membutuhkan penanganan konflik. Dalam penanganan konflik, ada berbagai macam istilah yang digunakan seperti manajemen konflik, *conflict settlement* (penyelesaian konflik), *conflict resolution* (resolusi konflik), rekonsiliasi, dan sebagainya. Dalam memahami penanganan konflik, Kelman dan Rouhana mengartikan bahwa *conflict settlement*, *conflict resolution*, dan rekonsiliasi mewakili tiga pendekatan untuk menciptakan perdamaian (*peacemaking*), namun ketiganya tidak boleh dilihat sebagai tiga cara berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.³²

Secara singkat, *conflict settlement* adalah suatu proses dimana para pihak yang berkonflik, melalui mediasi dan negosiasi, mencari kesepakatan penghentian formal suatu perselisihan berdasarkan perhitungan kepentingan bersama dan mencerminkan relasi kekuasaan yang ada di lapangan pada saat penyelesaian tercapai.³³ Sedangkan di sisi lain, dalam *conflict resolution* dipahami sebagai cara mengatasi penyebab konflik dan dengan demikian mencapai kompromi historis.³⁴ Persetujuan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dari kedua belah

³⁰ Tom Woodhouse and Hugh Mial Oliver Ramsbotham, *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Mangement and Transformation of Deadly Conflict.*, Polity, 2011, 2011, <https://doi.org/10.4324/9780203490792-4>.

³¹ Catalina Galer, "Introduction to Conflict Resolution : Concepts and Definitions," *Contemporary Conflict Resolution(3rd Edition)*, 2011, 1–32.

³² Herbert C. Kelman, "Resolving Deep-Rooted Conflict," *Social Psychology of Intergroup Reconciliation*, 2008.

³³ Kelman.

³⁴ Nadim N. Rouhana, "Group Identity and Power Asymmetry in Reconciliation Processes: The Israeli-Palestinian Case," *Peace and Conflict* 10, no. 1 (2004): 34, https://doi.org/10.1207/s15327949pac1001_3.

pihak, terlepas dari relasi kekuasaan di antara mereka.³⁵ Kebutuhan politik kedua belah pihak sama-sama ditangani, tidak hanya dalam relasi kuasa lama di antara mereka tetapi dalam kerangka relasi baru yang mengedepankan kesetaraan dan timbal balik. *Agreement* (pejanjian) bertujuan untuk mencapai hubungan damai antar masyarakat dan mewakili penerimaan timbal balik di antara para pihak. Ini tidak hanya mencari koeksistensi, tetapi juga kerja sama yang mencerminkan perdamaian berkelanjutan.³⁶

Selanjutnya dalam hal ini, rekonsiliasi adalah konsekuensi dari keberhasilan resolusi konflik. Demikian pula dapat dikatakan bahwa *conflict resolution* mengandaikan *conflict settlement*, kedua belah pihak akan menganggap konflik mereka telah berakhir dengan cara adil dan memuaskan jika kesepakatan politik harus dinegosiasikan oleh para pemimpin dari pihak-pihak yang berkonflik dan didukung didukung oleh kekuatan luar dan organisasi internasional yang relevan. Dengan demikian ketiga proses tersebut dapat dihubungkan secara berurutan, dengan *conflict settlement* sebagai langkah pertama, yang mungkin diikuti atau tidak oleh *conflict resolution*, dan setelahnya oleh rekonsiliasi. Namun tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa ketiga proses harus mengikuti urutan seperti itu.³⁷

Pemaknaan rekonsiliasi bagi para ahli adalah sebagai bagian dari proses pengampunan yang dicirikan oleh pengungkapan kebenaran, pendefinisian ulang identitas pihak yang bertikai, keadilan parsial, dan inisiasi untuk hubungan baru dan percaya bahwa hal tersebut untuk membangun sebuah tatanan sosial yang tetap

³⁵ Herbert C. Kelman, "Conflict Resolution and Reconciliation: A Social-Psychological Perspective on Ending Violent Conflict between Identity Groups," *Landscapes of Violence* 1, no. 1 (2010): 3, <https://doi.org/10.7275/R5H12ZX0>.

³⁶ Kelman.

³⁷ Kelman, "Resolving Deep-Rooted Conflict."

stabil.³⁸ Menurut perspektif sosiologi, Kriesberg mencirikan rekonsiliasi sebagai cara akomodatif anggota entitas yang berselisih untuk saling menghargai setelah terlibat dalam perjuangan yang intens dan seringkali bersifat destruktif.³⁹ Definisi ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi membutuhkan pihak terlibat untuk memperbaiki keadaan secara signifikan baik dari segi kognitif, emosional, dan perilaku. Para pemimpin berperan sebagai aktor pertama dalam memprakarsai proses rekonsiliasi dalam masyarakat. Sedangkan menurut Kelman, rekonsiliasi adalah pengembangan kepercayaan, transformasi hubungan menuju kemitraan berdasarkan timbal balik dan saling responsif, serta kesepakatan yang memenuhi kebutuhan dasar kedua belah pihak.⁴⁰

Rouhana memaknai rekonsiliasi sebagai proses yang berusaha untuk mencapai semacam hubungan antara pihak-pihak yang didasarkan pada legitimasi bersama. Pemberian legitimasi yang terbuka, yang berbasis publik dan sosial menjadi ciri dari hubungan yang saling timbal balik dan keamanan yang baik. Dengan demikian, rekonsiliasi, meskipun tidak mencegah ketegangan dalam hubungan dan perselisihan di masa depan antara para pihak, menjaga agar hubungan tidak berbalik ke tahap di mana legitimasi masing-masing pihak dipertanyakan lagi. Dalam pengertian ini, rekonsiliasi didefinisikan sebagai suatu proses akhir dari konflik eksistensial antara para pihak dan mengubah sifat

³⁸ Peter William J. Long and Brecke, *War and Reconciliation Reason and Emotion in Conflict Resolution*, 2003, <https://mitpress.mit.edu/books/war-and-reconciliation>.

³⁹ David Bargal and Emmanuel Sivan, *From Conflict Resolution to Reconciliation, Leadership and Reconciliation*, vol. 25, 2008.

⁴⁰ Kelman, "Resolving Deep-Rooted Conflict."

hubungan antara masyarakat melalui serangkaian tindakan yang terkait dengan perubahan psikologis, sosial, dan politik.⁴¹

Dalam tulisannya *Group Identity and Power Asymmetry in Reconciliation Processes: The Israeli–Palestinian Case*, Rouhana menjelaskan kesediaan untuk memulai proses rekonsiliasi tergantung pada sejumlah faktor yang menentukan sejauh mana kepentingan masing-masing pihak dalam mencari rekonsiliasi. Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan yang berkesinambungan, namun penulis akan membaginya menjadi tiga poin utama. Berikut adalah faktor-faktor yang berkaitan dalam mempengaruhi kesediaan pihak untuk terlibat dalam rekonsiliasi:

1. Matriks Hubungan Kekuasaan

Rouhana menyebutkan bahwa mungkin faktor atau alasan yang paling penting negara bersedia untuk terlibat dalam rekonsiliasi (termasuk semua upaya dalam penanganan konflik) adalah hubungan kekuasaan antara para pihak. Hubungan kekuasaan terdiri dari simetris dan asimetris. Hubungan simetris dicirikan oleh hubungan timbal balik yang seimbang. Dalam konteks ini, konflik simetris dapat dibicarakan ketika perselisihan terjadi antara musuh yang setara. Sedangkan hubungan asimetris adalah struktur yang dapat ditemukan diantara sebagian besar hubungan antar pihak-pihak yang tidak setara, dengan konteks aktor A menang dengan mengorbankan aktor B (*zero-sum*). Hubungan kekuasaan yang ada seharusnya menjadi titik tolak dalam analisis negosiasi mencapai rekonsiliasi karena di dalamnya terdapat realitas mendominasi-didominasi, penindas-tertindas, dan seterusnya dalam hubungan asimetris.

⁴¹ Rouhana, "Group Identity and Power Asymmetry in Reconciliation Processes: The Israeli-Palestinian Case."

Ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam negosiasi menuju rekonsiliasi perbaikan hubungan kekuasaan yang berselisih adalah instrumen, proses, pengaruh pihak ketiga, dan hasil.⁴²

- a) Dalam hal instrumen, simetri dan asimetri berkaitan dengan hubungan tujuan dan sarana. Penggunaan instrumen yang memadai ditunjukkan oleh siklus negosiasi konflik yang pada setiap tahap manajemen konflik harus dipilih dengan tepat. Jika tidak, tujuan de-eskalasi atau pencarian solusi tidak dapat dicapai.
- b) Dalam hal proses, hubungan simetris dan/atau asimetris merupakan perspektif yang berlaku di kedua belah pihak yang bernegosiasi. Pihak yang lebih kuat berusaha untuk menggunakan kekuatannya untuk kepentingan-kepentingannya dan pihak yang lebih lemah berusaha untuk mencapai kondisi yang setara dengan pihak yang lebih kuat. Ada kecenderungan selama proses negosiasi pihak yang lebih lemah untuk mencapai kesetaraan fungsional dalam negosiasinya dengan pihak yang lebih kuat. Pihak yang lebih lemah berusaha mengkompensasi kelemahannya melalui “peminjaman kekuasaan”, dan pihak yang lebih kuat berusaha untuk memaksakan kehendaknya dengan menggunakan *take it or leave it* atau bahkan strategi menerima atau menderita.⁴³ Pihak yang lebih kuat juga memainkan kekuatannya dengan memainkan hubungan asimetris,

⁴² Frank R. Pfetsch, “Power in International Negotiations: Symmetry and Asymmetry,” *Négociations* 16, no. 2 (2011): 39, <https://doi.org/10.3917/neg.016.0039>.

⁴³ I. William Zartman, “Conflict and Order: Justice in Negotiation,” *International Political Science Review* 18, no. 2 (1997): 121–38, <https://doi.org/doi:10.1177/019251297018002001>.

pihak yang lebih lemah ingin menyamakan kelemahannya, dan dengan demikian bernegosiasi atas dasar simetri.

- c) Dalam hal pengaruh pihak ketiga, dalam sebagian besar proses resolusi konflik, seorang mediator atau fasilitator melakukan intervensi untuk membantu pihak-pihak yang bernegosiasi keluar dari kemungkinan kebuntuan. Agar dapat diterima untuk peran seperti itu, pihak ketiga harus sama-sama diterima oleh kedua pihak. Hubungan simetris antara mediator dan pihak-pihak yang berkonflik merupakan prasyarat untuk pengelolaan konflik yang akhirnya berhasil.
- d) Dalam hal hasil, pihak yang lebih lemah ingin mendapatkan bagiannya yang adil di akhir negosiasi, karenanya bertujuan untuk hasil utilitas simetris. Hasil berkaitan dengan persepsi tentang apa yang benar dan salah, adil dan tidak adil, atau memuaskan dan tidak memuaskan. Hasil yang baik menghasilkan kemenangan yang memuaskan bagi kedua belah pihak; maka simetris hasil diukur dalam hal utilitas.

2. Identitas dan Narasi Nasional

Identitas nasional adalah definisi kelompok tentang dirinya sebagai kelompok yang konsepsinya tentang karakteristik dan nilai-nilai dasarnya yang bertahan lama, kekuatan dan kelemahannya, harapan dan ketakutannya, reputasi dan kondisi kebradaannya; dorongan dan tradisi, sejarah masa lalu, tujuan saat ini, dan prospek masa depannya.⁴⁴ Identitas kolektif masing-masing kelompok

⁴⁴ Herbert C. Kelman, "The Role of National Identity in Conflict Resolution," *Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction*, 2001.

didukung oleh narasi nasional (catatan tentang asal-usul kelompok, dan sejarah) yang menjelaskan dan mendukung rasa kekhasannya.

Setiap pihak dalam perselisihan memiliki dan membawa narasi dan identitasnya sendiri, versi sejarahnya sendiri, dan biasanya rasa viktimisasi yang kuat. Dengan demikian, masing-masing pihak memasukkan fakta sejarah ke dalam skema kognitif konfliknya sendiri. Diskusi fakta-fakta ini hanya akan mengarah pada bentrokan narasi yang tak terpecahkan yang akan menyoroti perbedaan dan membuat para pihak frustrasi. Menurut Kelman, untuk itu kedua belah pihak yang menganggap diri mereka sebagai korban dibantu dalam menghadapi dilema meninggalkan beberapa elemen identitas tanpa mengancam inti identitas mereka dengan sifat timbal balik pada rekonsiliasi.⁴⁵ Perubahan pada bagian dari satu kelompok membuat perubahan pada bagian lain dapat dicapai dengan negosiasi. Lebih jauh, implikasi psikologi dalam konsensus rekonsiliasi untuk identitas kolektif dan narasi nasional akan memperbaiki sejarah serta visi demi generasi selanjutnya.

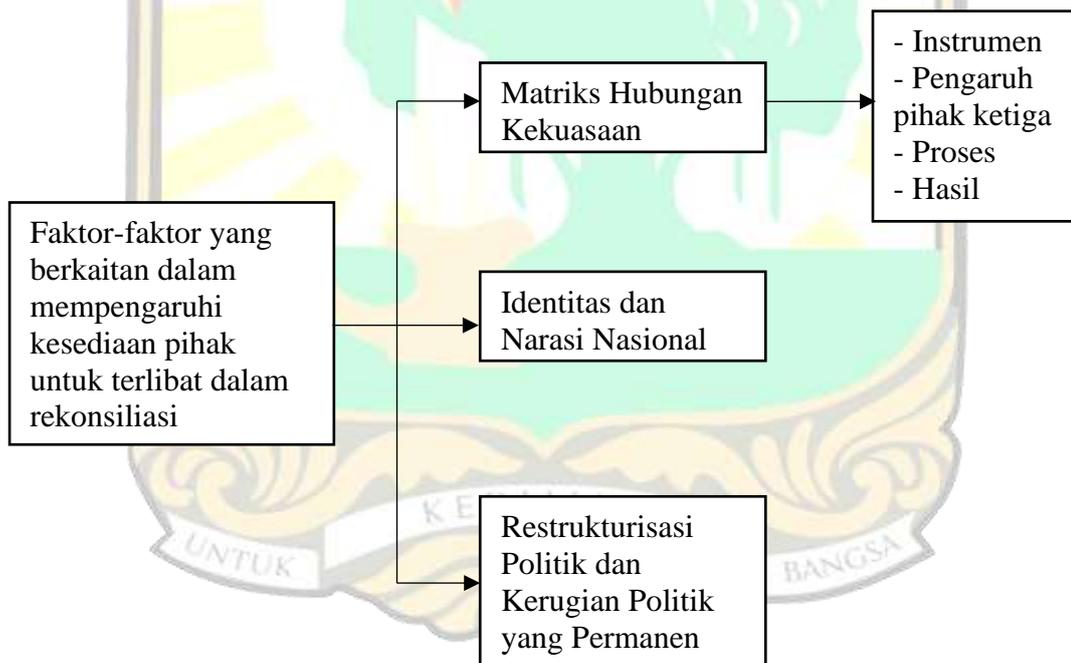
3. Restrukturisasi Politik dan Kerugian Politik yang Permanen

Rekonsiliasi memerlukan perubahan politik dan struktural yang dipandu oleh keadilan. Restrukturisasi mempertimbangkan kesalahan masa lalu dan konsekuensinya yang tidak adil ketika mendirikan institusi politik dan sosial baru. Perilaku politik, pelembagan, dan restrukturisasi itulah yang menjadi fokus hubungan masa depan antara para pihak berdasarkan kesetaraan dan martabat manusia. Restrukturisasi ini menciptakan kondisi yang kondusif untuk memenuhi

⁴⁵ Herbert C. Kelman, "Conflict Resolution and Reconciliation: A Social-Psychological Perspective on Ending Violent Conflict between Identity Groups," *Landscapes of Violence* 1, no. 1 (2010): 4–9.

kebutuhan manusia dan menghormati koeksistensi dan kerjasama antara berbagai pihak yang berkonflik.

Rekonsiliasi menjadi mungkin ketika sistem yang ada menghadapi kekalahan yang dapat dihindari hanya dengan menerima transformasi (dari upaya restrukturisasi) politik dan sosial. Dalam hal ini, sistem yang melakukan menyimpulkan bahwa tanpa transformasi, sistem dapat runtuh dan kepentingan kelompok dapat dirusak secara permanen.⁴⁶ Keinginan memperbaiki buruknya struktur masa lalu saat konflik dan kesadaran akan ancaman dari kerugian politik bagi para pihak berkonflik pada akhirnya membawa ke meja perundingan dan perjanjian untuk rekonsiliasi.



Gambar 1. 1Bagan faktor-faktor yang berkaitan dalam mempengaruhi kesediaan pihak untuk terlibat dalam rekonsiliasi

Sumber: Diolah oleh penulis

⁴⁶ Rouhana, "Group Identity and Power Asymmetry in Reconciliation Processes: The Israeli-Palestinian Case."

Ketiga faktor yang disebutkan oleh Rouhana ini cocok dengan faktor yang dilakukan Qatar-Arab Saudi dalam mempengaruhi terlaksananya rekonsiliasi berdasarkan berbagai kajian literatur yang penulis lakukan. Berdasarkan hal tersebut faktor-faktor tersebut akan digunakan penulis untuk mendeskripsikan apa faktor-faktor penyebab rekonsiliasi pada konflik Qatar-Arab Saudi mencapai keberhasilan.

1.8 Metode Penelitian

Metode berguna bagi penulis sebagai acuan dan prosedur untuk memperoleh pengetahuan dari topik yang dibahas sebagai bagian dari kajian hubungan internasional.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berarti penulis akan mendeskripsikan fakta dan data yang didapatkan terkait penyelesaian konflik Qatar dan Arab Saudi melalui rekonsiliasi. Penelitian ini akan banyak menggambarkan sebab konflik dan upaya-upaya penyelesaian konflik Qatar-Arab Saudi sebelum rekonsiliasi yang di dapatkan dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Penelitian jenis ini dipilih agar penulis bisa dengan leluasa menjelaskan dan menggambarkan penyelesaian konflik Qatar-Arab Saudi melalui rekonsiliasi.

1.8.2 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tetap berpijak pada fokus utamanya dan tidak meluas ke berbagai bahasan yang menjadikannya jauh dari pokok permasalahan, maka penulis menetapkan batasan untuk penelitian ini yaitu kurun waktu 2017-2021. Periode ini

dipilih karena konflik Qatar-Arab Saudi bermula pada tahun 2017 sampai pada upaya rekonsiliasi pada tahun 2021.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Adapun unit analisis dalam penelitian menurut Mochtar Mas'oeed adalah objek atau unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan.⁴⁷ Unit ini juga sering disebut sebagai variabel dependen. Unit analisis dalam penelitian ini adalah faktor keberhasilan Qatar dan Arab Saudi mencapai rekonsiliasi.

Sedangkan unit yang akan mempengaruhi atau berdampak terhadap unit analisis yang perilakunya akan diamati merupakan unit eksplanasi atau disebut juga dengan variabel independen. Unit eksplanasi atau variabel independen sangatlah penting karena dapat menjelaskan unit atau objek yang perilakunya akan diamati, didefinisikan, serta diramalkan. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah keberhasilan Qatar dan Arab Saudi mencapai rekonsiliasi.

Penentuan unit analisis dan unit eksplanasi ini sangat penting guna menemukan sasaran tingkat atau level analisis yang tepat. Dalam bukunya, Mohtar Mas'oeed juga menjelaskan bahwa level analisis merupakan tingkatan objek atau unit yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian.⁴⁸ Lebih lanjut, beliau mengemukakan lima tingkatan analisis yang digunakan dalam sebuah penelitian yaitu level individu, kelompok individu, negara-bangsa, kelompok negara bangsa, dan sistem internasional. Berdasarkan tingkatan tersebut, level analisis dari

⁴⁷ Mochtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Yogyakarta: Pusat antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada, LP3E, 2008), 39.

⁴⁸ Mochtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, 40

penelitian ini adalah negara-bangsa karena upaya yang dilakukan untuk penyelesaian masalah dilakukan oleh Qatar dan Arab Saudi demi mendapatkan kepentingan dari masing-masing negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni mengambil dan menganalisis dari data-data yang telah ada sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Adapun cara pengumpulan data berupa *library research* atau studi kepustakaan. Studi pustaka pada dasarnya adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai sumber bacaan dan literatur akademik seperti buku *Reconciliation After Violent Conflict A Handbook*, buku dari Hugh Miall, Ramsbotham, dan Tom Woodhouse berjudul *Contemporary Conflict Resolution*, dan buku *Intergroup Conflicts and Their Resolution*.

Jurnal-jurnal internasional dan nasional yang dikumpulkan guna mendapat informasi terkait isu konflik Qatar dan Arab Saudi seperti *From Conflict Resolution to Reconciliation, Divide Gulf, Contemporary Gulf Studies, Conflict, Security, and Development, The Future of Arab Spring Reality and Ambition*, artikel berjudul *Qatar and the Arab Spring: down the foreign policy slope* dalam *Contemporary Arab Affairs*, artikel *Rivalries in the Gulf: Geopolitical Implications of the Qatar Crisis*, artikel *Superpower and Small-State Mediation in the Qatar Gulf Crisis* dalam *Italian Journal of International Affairs*, artikel *The New Gulf Order: Crisis, Mediation, and Reconciliation*, jurnal Ilmu Politik dan Dampak Kebijakan, serta jurnal pendukung lainnya.

Selain itu data-data dari media outlet dan situs resmi Qatar-Arab Saudi, arsip pemerintahan maupun laporan penelitian yang terkait dengan Qatar-Arab

Saudi, berita seperti Al-Jazeera, Al Arabiya, Gulf News, Arabic News, dan sebagainya. Data yang akan dikumpulkan adalah terkait dinamika hubungan dan dinamika konflik antara Qatar dan Arab Saudi, perkembangan upaya-upaya meresolusi konflik Qatar dan Arab Saudi, serta keberhasilan rekonsiliasi Qatar dan Arab Saudi. Pengumpulan berbagai data yang dijelaskan di atas akan dilakukan dengan menggunakan kata kunci konflik Qatar-Arab Saudi, *Gulf crisis*, resolusi konflik, dan rekonsiliasi sehingga mempermudah penemuan data yang sesuai.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini memiliki pendekatan kualitatif yang akan fokus pada analisis mengenai faktor-faktor penyebab keberhasilan konflik Qatar-Arab Saudi mencapai tahap rekonsiliasi melalui data-data sekunder seperti surat kabar, laporan, dan jurnal yang membutuhkan pemahaman terhadap sumber tersebut secara menyeluruh. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana terdapat tiga alur kegiatan yang akan dilewati dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴⁹

a. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, memusatkan, atau mengabstraksi data yang muncul dari berbagai sumber empiris. Dalam penelitian ini, kondensasi data akan dilakukan dengan menggunakan kata kunci konflik Qatar-Arab Saudi, *Gulf crisis*, resolusi

⁴⁹ “Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana - Google Buku,” accessed April 13, 2022, <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

konflik, dan rekonsiliasi dalam proses pencarian data agar dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data secara sederhana adalah pengorganisasian dan penyusunan data yang memungkinkan penyimpulan atas suatu aksi. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti uraian dan tabel. Dalam penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan melalui sumber sekunder mengenai faktor-faktor keberhasilan mencapai tahap rekonsiliasi pada konflik Qatar-Arab Saudi akan peneliti sajikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan pihak untuk terlibat dalam rekonsiliasi Rouhana melalui uraian atau teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis yang terakhir adalah penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berarti peneliti terus melakukan verifikasi terhadap data-data yang telah dikumpulkan sepanjang proses pengumpulannya, yaitu pengategorian data yang sudah disajikan berdasarkan taksonomi rekonsiliasi Rouhana sehingga terlihat sebab dan faktor keberhasilan rekonsiliasi pada konflik Qatar-Arab Saudi. Selanjutnya, dari faktor-faktor tersebut, akan dilihat faktor apa yang kemudian paling mendorong Qatar-Arab Saudi bisa berhasil mencapai perjanjian dan rekonsiliasi.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka dari literatur terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan penelitian, kerangka konseptual yang digunakan dalam menganalisis data, metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, batasan masalah, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penelitian.

BAB II Dinamika Hubungan Qatar-Arab Saudi

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hubungan bilateral antara Qatar-Arab Saudi. Pembahasan pada bab ini akan memperlihatkan hubungan kedua negara yang fluktuatif.

BAB III Proses Pemulihan Hubungan Qatar-Arab Saudi

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana proses awal mediasi hingga rekonsiliasi antara Qatar-Arab Saudi.

BAB IV Analisis Faktor Keberhasilan Qatar-Arab Saudi Mencapai Tahap Rekonsiliasi

Pada bagian ini akan berisikan analisis dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang berkaitan dalam mempengaruhi kesediaan Qatar dan Arab Saudi untuk terlibat dalam rekonsiliasi dan memperbaiki hubungan antar keduanya.

BAB V Penutup

Bagian ini merupakan bagian terakhir yang akan berisikan kesimpulan dan saran terkait penelitian topik.

